

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alfira, 2012, *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*, Raih Asa Sukses, Bogor.
- Asmarawati, Tina, 2013, *Hukum dan Psikiatri*, Deepublish Publisher, Yogyakarta.
- Asmarawati, Tina, 2015, *Delik-Delik Yang berada Di Luar KUHP*. Deepublish Publisher, Yogyakarta.
- Bungin, Burhan, 2010, *Analisa Data Penelitian Kualitatif*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Danim, Sudarman, 2002, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung.
- De-Fries, Dede William, 2006, *Gender Bukan Tabu*, ICIFOR, Bogor.
- Dianita, I Made Pasek, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Diarsi, Mira. 2001, *Layanan Yang Berpihak*, Komnas Perempuan, Jakarta.
- Febriasih, Happy Budi., 2008, *Gender dan Demokrasi*, Averoes Press, Malang.
- Hamzah, Andi, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Helmi, Muhammad Izhar, 2017, *Gagasan Pengadilan Khusus KDRT*, Deepublish Publisher, Sleman.
- Irianto, Sulistyowati, 2003, *Perempuan di Antara Berbagai Pilihan Hukum*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Kelompok Kerja Convention Watch, 2004. *Hak Azasi Perempuan: Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.

Komnas Perempuan, 2017, *Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2017*, Komnas Perempuan, Jakarta.

Komnas Perempuan, 2005, Kertas Kebijakan: Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang Berkeadilan Gender Dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan, Komnas Perempuan, Jakarta.

Lamintang, PAF, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung.

LRC KJHAM dan FPL Indonesia, 2017, *Buku Rujukan Pedoman Untuk Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Jawa Tengah dan DIY*, Cendana Printing, Semarang.

Moeljatno, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

Muladi, Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.

Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*. Griya Media, Salatiga.

Prakoso, Djoko, 1987, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Semarang.

Ranidar, Darwis, 2003, *Pendidikan Hukum dalam Konteks Sosial Budaya bagi Pembinaan Kesadaran Hukum Warga Negara*, Departemen Pendidikan Indonesia UPI, Bandung.

Rasyid, Thalib Abdur, 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan RI*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.

Ridwan dan Abdul Wachid, 2006, *Kekerasan Berbasis Gender*, Fajar Pustaka, Yogyakarta.

Sugiarto, Eko, 2017, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis*, Suaka Media, Sleman.

Sunardi, Danny Tanuwijaya, Abdul Wahid, 2005, *Republik “Kaum Tikus”*; *Refleksi Ketidakberdayaan Hukum dan Penegakan HAM*, Edsa Mahkota, Jakarta.

Syahroni, 2017, *Korupsi Bukan Budaya Tapi Penyakit*, Depublish Publisher, Yogyakarta, hlm. 8.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembara Negara Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5248).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419).

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1084).

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang panduan pembentukan dan pengembangan pusat pelayanan terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 446)

C. Penelitian Hukum

Basuki, Muhammad Nur Aji, 2013, Peran Lembaga Penyedia Layanan Terpadu Berbasis Gender dan Anak bagi Anak Korban KDRT, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.

Iswantoro, Yuni, 2016, Penerapan Mediasi Penal oleh Penyidik Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Skripsi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Mulyaningsih, Ika, 2013, Perlindungan Hak-Hak Perempuan Terhadap Pelanggaran HAM di Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Perspektif Hukum dan HAM, Skripsi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Naraswati, 2013, Upaya Penanggulangan Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh Penegak Hukum Militer, Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar.

Risfandi, Dedi, 2014, Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2006, Panduan Bantuan Hukum di Indonesia, Sentralisme Production, Jakarta.

C. Sumber Internet

Ady, "Lemah, Penegakan Hukum Bagi Korban KDRT", www.hukumonline.com, diakses 14 September 2017.

Dasuki, Muhammad, "Kasus KDRT Tinggi di Jawa Tengah", <http://www.aktual.com/>, diakses 14 September 2017.

Imam, Raga, “Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan”,
<http://majalahkartini.co.id/>, diakses 15 September 2017.

Kencana, Dhana, “Empat Daerah di Jawa Tengah Masuk Zona Merah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak”,<http://m.metrotvnews.com/jateng>, diakses 14 September 2017.

LRC-KJHAM, “Sejarah LRC-KJHAM”,<https://www.lrckjham.org/>, diakses 15 September 2017.

Nugroho, Adi, “Korban KDRT Ogah Laporkan”,www.jawapos.com/radarkediri/, diakses 15 September 2017.

Komnas Perempuan, “Siaran Komnas Perempuan: 12 Tahun Implementasi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga”,
<http://www.komnasperempuan.go.id/>, diakses 12 September 2017.